

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, J. P., Hidajat, K., & Andarani, A. F. (2019). Implementasi Kebijakan *Earmarking Tax* Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pajak Vokasi*.
- Agustino, J. P., Hidajat, K., & Andarani, A. F. (2019). Implementasi Kebijakan *Earmarking Tax* Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. 4.
- Almagahfi, L. B., Hidayat, K., & Mayowan, Y. (2016). Studi Pemikiran Penerapan *Tax Earmarking* pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Malang. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Anumpita, L. D., Tinangon, J. J., & Runtu, T. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud
- Cahyat, A. (2005). *Perubahan Perundangan Desentralisasi Apa yang Berubah? Bagaimana Dampaknya dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan? dan Apa yang Perlu Dilakukan*. CIFOR.
- Habibi, M. M. (2016). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/ Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Kairupan, G. E., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Penerapan Kebijakan *Earmarking Tax* pada Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung. *EMBA*.
- Lamaya, F., & Martono. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD di Kabupaten Lembata. *Jurnal Akuntansi*, 24.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mittermaier, & Wexler. (2014). *Earmarking: Concept, Consequences, and Contexts*. San Fransisco: Adler & Colvin A Law Corporation.
- Mustoffa, A. F. (2018). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- Nuradhawati, R. (2019). *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. Jurnal Academia Praja.*
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, P. R.
- Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, P. R.
- Putri, R. K. (2018). Implementasi Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang PDRD Terhadap PAD. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.*
- Rondinelli, D., & Cheema, G. S. (1983). *Government Decentralization in Comparative Perspective: Theori and Practive in Developing Countries. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications.*
- Rudianto, W. D. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan dan Kebijakan *Earmarking Tax* terhadap Kepuasan Wajib Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang.
- Smith, B. (1985). *Decentralization, The territorial Dimension of the State.* London: George Allen & Unwin.
- Sumarjo. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tumangke, F. (2015). Analisis Penerapan Kebijakan *Earmarking Tax* Pada Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.*
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses.* Jakarta: PT Buku Kita.